



RENJA P-APBD 2024

**RENCANA KERJA
P-APBD TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberi rahmat dan hidayah-NYA, atas telah tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) P-APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah. Disamping itu juga berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Renja DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro 2024 merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Renja 2024 juga disusun menggunakan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis DPMPTSP perubahan periode 2024-2026. Rencana Kerja tahun 2024 memuat program dan kegiatan sebagai perwujudan komitmen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati dalam Renstra DPMPTSP 2024-2026.

Bojonegoro, 12 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOJONEGORO

YUSNITA LIASARI, ST., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19721127 199803 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	6
 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
 BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	53
3.3. Program dan Kegiatan.....	56
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
 BAB V : PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

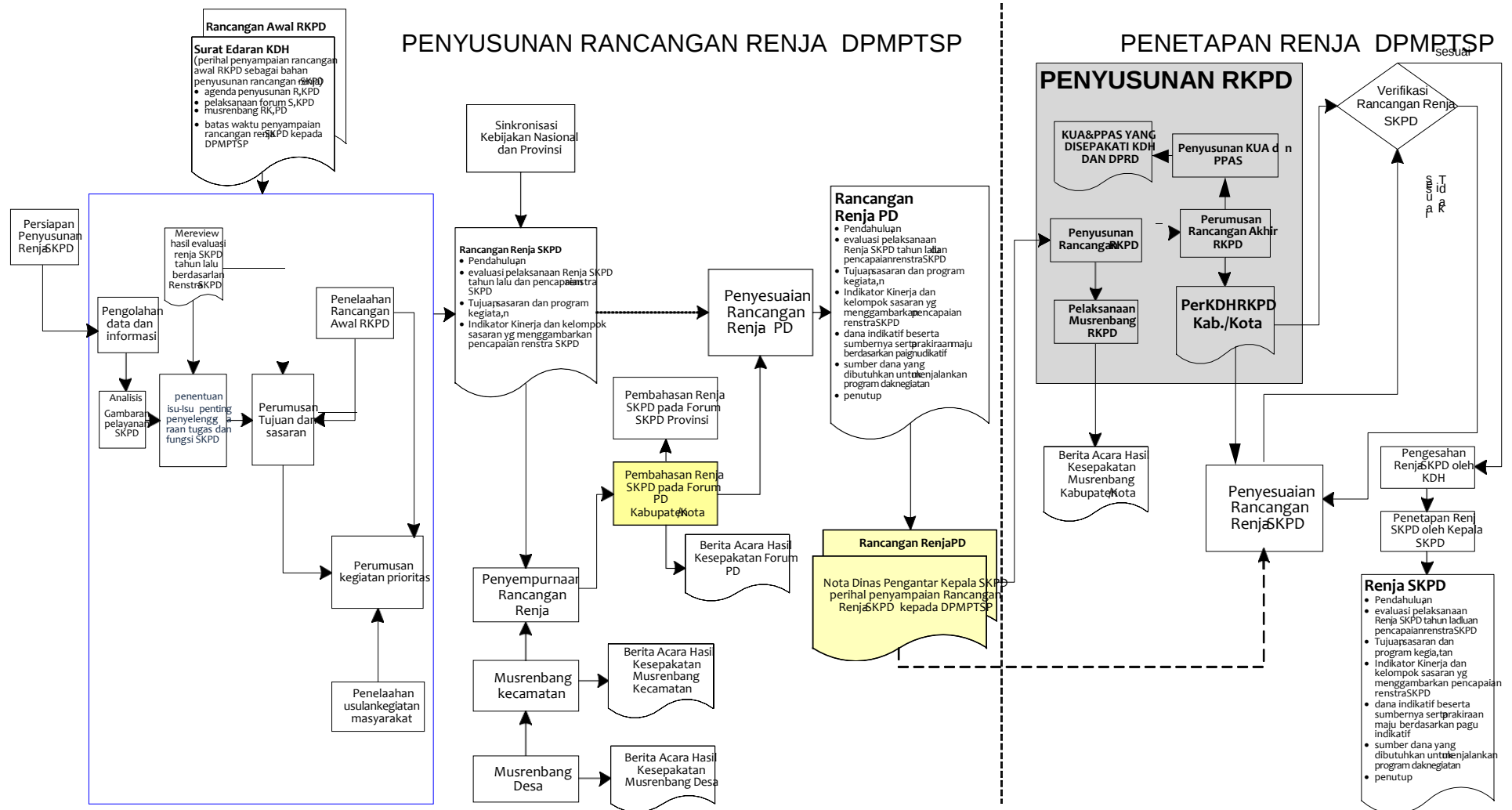
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab. X menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan bahwa Renstra-PD dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renja PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja PD mempunyai peranan yang sangat strategis, karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 berikut bagan alur tahapan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro



Berdasar hal tersebut, maka penyusunan Renja P-APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2024-2026. Perubahan Renja ini disusun untuk memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2041;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perijinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) P-APBD DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja DPMPTSP tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Acuan DPMPTSP dalam mengimplementasikan RPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Merumuskan program dan kegiatan pembangunan DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen PD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3. Maksud dan Tujuan. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.
- 1.4. Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; serta

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RPD. Berisikan uraian mengenai, proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD
- 3.3. Program dan Kegiatan. Berisikan penjelasan mengenai, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Pada bagian berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah yang di dapatkan dari table “Program Kegiatan Perangkat Daerah” pada menu Renja di SIPD Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV PENUTUP, Berisikan uraian penutup, Berupa :

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- c. Rencana tindak lanjut, Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah serta cap pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- d. Lampiran, Pada bagian ini berisi SK tim penyusun Renja perangkat Daerah dan penyusunan agenda kerja.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro berpedoman kepada Sasaran, indikator kinerja utama (IKU), program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan” dan “Meningkatkan potensi dan peluang investasi yang kondusif”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu :

Sasaran Pertama

Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target kinerja 90, realisasi 89.54 sehingga capaian kinerja sebesar 99.5 %

Sasaran Kedua,

Meningkatnya investasi dengan 2 indikator :

- Indikator sasaran 1 Peningkatan realisasi investasi dengan target 7.1 triliun dan
- Indikator sasaran 2 Jumlah Usaha dengan target 4.000 unit usaha.

Pada tahun 2022 telah di lakukan berbagai upaya untuk mencapai target sasaran yg telah di tentukan dengan cara menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yang telah di tetapkan sehingga pada akhir periode pada tahun 2022 capaian adalah sebagai mana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2023 yang di bandingkan dengan tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	89.54	90	89,94	99.9
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	Peningkatan realisasi investas	7.1 T	9.8 T	7.2 T	11.1 T	154
		Jumlah Usaha	4.000	9.476	4.400	16.069	365.2

Sumber LPPD DPMPTSP 2022

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 indikator yang di ukur pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) persentase capaian kurang sedikit dari target yang telah ditentukan yaitu dari target nilai SKM 90 hanya tercapai 89.94 atau capaian sebesar 99.5 %, terdapat 2 (dua)

indikator kinerja capaiannya melebihi dari target yang telah di tentukan yaitu : 1. Peningkatan realisasi investasi dan 2. Jumlah Usaha.

Pencapaian terhadap target kinerja sasaran sebagaimana telah disebutkan bukan berarti tanpa hambatan, adapun permasalahan dalam urusan penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Data potensi investasi yang tersedia kurang detail.
- b. Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud
- c. Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal
- d. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Bojonegoro.
- e. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang penanaman modal dan teknis perizinan
- f. Terkait dengan Tim Teknis yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi, prosesnya masih di masing-masing perangkat daerah dan belum di delegasikan kepada Tim Teknis yang merupakan bagian dari DPMPTSP

Permasalahan tersebut diatas menjadi evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja dan menjadi masukan atau acuan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2024, sehingga dapat terakomodir dalam program dan kegiatan prioritas pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan berdasarkan capaian kinerja program kegiatan atau tingkat pencapaian Renja DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro atas realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023, rekap pendapatan dan belanja pada tahun 2022 dibandingkan 2023 Rekapitulasi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 (tahun berjalan) dapat dilihat pada tabel berikut :

**CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Tabel 2.2**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	Capaian Prosentase Anggaran (%)	Capaian Prosentase Fisik (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.691.277.695,00	5.211.740.874,00	92%	96.97
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.137.501,00	135.534.650,00	99%	98.26
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.405.796.444,00	3.036.477.803,00	89,16%	98.02
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.948.700,00	121.177.540,00	95,45%	98.09
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.076.349.350,00	995.646.585,00	92,50%	90.50
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.045.700,00	922.904.296,00	97,66%	100.00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	421.656.950,00	419.229.188,00	99,42%	100.00
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4.609.500,00	4.541.200,00	98,52%	100.00
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	417.047.450,00	414.687.988	99,43%	100.00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	257.318.250,00	256.834.209,00	99,81%	94.83
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	257.318.250,00	256.834.209,00	99,81%	84.50
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.314.720.504,00	1.278.672.523,00	97,26%	100.00
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.314.720.504,00	1.278.672.523,00	97,26%	100.00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	313.110.000,00	299.868.768,00	95,77%	100.00
	Kegiatan 'Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	313.110.000,00	299.868.768,00	95,77%	100.00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	144.568.000,00	134.945.792,00	93,34%	100.00
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.568.000,00	134.945.792,00	93,34%	100.00
	JUMLAH	8.142.651.399,00	7.601.291.354,00	93,35%	98.63

**REKAP PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022
DAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Tabel 2.3**

URAIAN	TA 2023			TA 2022
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
PENDAPATAN	4.363.800.000,00	1.430.408.472,00	32,78	779.717.888
Pendapatan Retribusi Daerah	4.363.800.000,00	1.430.408.472,00	32,78	779.717.888
BELANJA	8.142.651.399,00	7.601.291.354,00	90.19	6.946.084.075
Belanja Operasi	7.534.698.999,00	7.013.436.354,00	89.84	6.643.652.076
- belanja Pegawai	3.415.816.444,00	3.032.373.791	87.85	3.032.373.791
- Belanja Barang dan jasa	4.118.882.555,00	3.611.278.285	91.89	3.611.278.285
Belanja Modal	607.952.400,00	587.855.000,00	96,69	302.432.000
- Belanja Peralatan dan Mesin	589.952.400,00	569.855.000,00	96,59	-
- Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	302.432..000
- Belanja jalan , irigasi dan jaringan	18.000.000,00	18.000.000,00	100	-
- Belanja modal asset tetap lainnya	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	8.142.651.399,00	7.601.291.354,00	93,35	8.028.233.963

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (tahun berjalan)
KABUPATEN BOJONEGORO
Tabel 2.4 (Tabel T-C. 19.)**

No	Kode			Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5x100%		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																DPMPTSP	
					Penanaman Modal																DPMPTSP	
2	18				Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik															DPMPTSP		
					Meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86.5 Nilai		89.54 Nilai		90 Nilai		89.94 Nilai		99.93 %		89.94 Nilai		103.98 %				
					Meningkatnya Realisasi Investasi	7.2 Persen		9.8 Persen		7.2 Persen		5.40 Persen		75.00 %		5.40 Persen		75.00 %				
2	18	02			Sasaran : Meningkatnya Investasi															DPMPTSP		
					Jumlah Usaha	44 Unit		9476 Unit		4400 Unit		4400 Unit		100 %		4400 Unit		10000.00 %				
					Nilai Realisasi Investasi	7.2 Triliun		9.8 Triliun		7.2 Triliun		5.40 Triliun		75.00 %		5.40 Triliun		75.00 %				
1	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1,053,990,180		166,506,380		421,656,950		419,229,188		99.42 %		585,735,568		55.57 %	DPMPTSP	
					Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitas kemudahan Penanaman modal	96 Unit usaha		71 Unit usaha		1 Unit usaha		1 Unit usaha		100 %		1 Unit usaha		1.04 %				
	2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			261,301,750		148,379,875		4,609,500		4,541,200		98.52 %		152,921,075		58.52 %	DPMPTSP	
					Jumlah Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun	96 Unit usaha		69 Unit usaha		1 Unit usaha		1 Unit usaha		100 %		70 Unit usaha		72.92 %				
	2	18	02	2.01	01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			253,705,050		148,379,875		2,647,800		2,639,500		99.69 %		151,019,375		59.53 %	DPMPTSP	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100 %		3 Dokumen		100 %				
	2	18	02	2.01	02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			7,596,700				1,961,700		1,901,700		96.94 %		1,901,700		25.03 %	DPMPTSP	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	54 Kegiatan Usaha				10 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha		100 %		10 Kegiatan Usaha		18.52 %				
	2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			792,688,430		18,126,505		417,047,450		414,687,988		99.43 %		432,814,493		54.60 %	DPMPTSP	
					Jumlah peta potensi investasi yg dibuat dalam satu tahun	5 Unit usaha		4 Unit usaha		1 Unit usaha		1 Unit usaha		100 %		5 Unit usaha		100 %				
	2	18	02	2.02	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			792,688,430		18,126,505		417,047,450		414,687,988		99.43 %		432,814,493		54.60 %	DPMPTSP	
					Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100 %		3 Dokumen		100 %				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM														100 %	99.42 %			78.29 %	55.57 %			
2	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			776,585,250		883,929,211		257,318,250		256,834,209		99.81 %		1,140,763,420		146.89 %	DPMPTSP	

No	Kode				Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah promosi yang dilaksanakan	9 Media Promosi		6 Media Promosi		3 Media Promosi		3 Media Promosi		100 %		3 Media Promosi		33.33 %			
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			776,585,250		883,929,211		257,318,250		256,834,209		99.81 %		1,140,763,420		146.89 %		DPMPTSP
						Jumlah promosi penanaman modal yg dilaksanakan dalam satu tahun	9 Media Promosi		6 Media Promosi		3 Media Promosi		3 Media Promosi		100 %		9 Media Promosi		100 %			
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			255,818,250		4,079,061		257,318,250		256,834,209		99.81 %		260,913,270		101.99 %		DPMPTSP
						Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen		5 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100 %		8 Dokumen		100 %			
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			520,767,000		879,850,150								879,850,150		168.95 %		DPMPTSP
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9 Dokumen		6 Dokumen								6 Dokumen		66.67 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM															100 %	99.81 %			88.89 %	146.89 %		
3	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2,862,115,001		2,082,388,944		1,314,720,504		1,278,672,523		97.26 %		3,361,061,467		117.43 %		DPMPTSP
						Jumlah ajuan Perizinan yang lengkap persyaratannya	38382 Ijin		33880 Ijin		18551 Ijin		16069 Ijin		86.62 %		16069 Ijin		41.87 %			
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			2,862,115,001		2,082,388,944		1,314,720,504		1,278,672,523		97.26 %		3,361,061,467		117.43 %		DPMPTSP
						Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan dalam satu tahun	45000 Ijin		33880 Ijin		18551 Ijin		16069 Ijin		86.62 %		49949 Ijin		111.00 %			
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1,046,050,650		824,632,104		929,852,900		898,965,358		96.68 %		1,723,597,462		164.77 %		DPMPTSP
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	45993 Pelaku Usaha		30660 Pelaku Usaha		18551 Pelaku Usaha		16069 Pelaku Usaha		86.62 %		46729 Pelaku Usaha		101.60 %			
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			523,704,440		262,786,553								262,786,553		50.18 %		DPMPTSP
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	15831 Kegiatan Usaha		15579 Kegiatan Usaha								15579 Kegiatan Usaha		98.41 %			
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			1,279,632,731		982,243,107		384,867,604		379,707,165		98.66 %		1,361,950,272		106.43 %		DPMPTSP
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	31138 Orang		15809 Orang		550 Orang		546 Orang		99.27 %		16355 Orang		52.52 %			

No	Kode				Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
	2	18	04	2.01	04		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		12,727,180		12,727,180							12,727,180		100 %		DPMPTSP	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha								24 Kegiatan Usaha		100 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM															90.84 %	97.26 %			92.71 %	117.43 %		
4	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		1,095,660,000		415,960,884		313,110,000		299,868,768		95.77 %		715,829,652		65.33 %	DPMPTSP	
						Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan pengawasan penanaman modal	618 Orang		424 Orang		196 Orang		195 Orang		99.49 %		195 Orang		31.55 %			
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1,095,660,000		415,960,884		313,110,000		299,868,768		95.77 %		715,829,652		65.33 %	DPMPTSP	
						Jumlah pelaku usaha yang di verifikasi datanya dalam satu tahun	618 Orang		424 Orang		178 Orang		172 Orang		96.63 %		596 Orang		96.44 %			
	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		152,460,000		15,667,924		50,000,000		49,978,568		99.96 %		65,646,492		43.06 %	DPMPTSP	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	518 Kegiatan Usaha		162 Kegiatan Usaha		178 Kegiatan Usaha		176 Kegiatan Usaha		98.88 %		338 Kegiatan Usaha		65.25 %			
	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		660,060,000		325,445,460		184,460,000		178,620,200		96.94 %		504,265,660		76.40 %	DPMPTSP	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	692 Pelaku Usaha		454 Pelaku Usaha		238 Pelaku Usaha		219 Pelaku Usaha		92.02 %		673 Pelaku Usaha		97.25 %			
	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		283,140,000		74,847,500		78,650,000		71,070,000		90.36 %		145,917,500		51.54 %	DPMPTSP	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	960 Kegiatan Usaha		630 Kegiatan Usaha		330 Kegiatan Usaha		310 Kegiatan Usaha		93.94 %		940 Kegiatan Usaha		97.92 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM															95.37 %	95.77 %			89.22 %	65.33 %		
5	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		315,841,250		296,830,262		144,568,000		134,945,792		93.34 %		431,776,054		136.71 %	DPMPTSP	
						Jumlah data yang diproses	30 Jenis Data		6 Jenis Data		24 Jenis Data		23 Jenis Data		95.83 %		23 Jenis Data		76.67 %			
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		315,841,250		296,830,262		144,568,000		134,945,792		93.34 %		431,776,054		136.71 %	DPMPTSP	
						Jumlah data yang diproses	30 Jenis Data		6 Jenis Data		24 Jenis Data		23 Jenis Data		95.83 %		29 Jenis Data		96.67 %			
	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		315,841,250		296,830,262		144,568,000		134,945,792		93.34 %		431,776,054		136.71 %	DPMPTSP	
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	24 Dokumen		14 Dokumen		24 Dokumen		23 Dokumen		95.83 %		37 Dokumen		154.17 %			

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM													95.83 %	93.34 %			125.42 %	138.71 %		
				NON URUSAN															CPMPTSP	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG X.XX															CPMPTSP	
	X	XX	01	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah															CPMPTSP	
				Nilai IKM	865 Nilai		8954 Nilai		90 Nilai		3954 Nilai		9948.89 %		8954 Nilai		1035.14 %			
				Nilai SAKIP PD																
6	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16,507,475,068		9,080,693,857		5,691,277,695		5,211,740,874		91.57 %		14,292,434,731		86.58 %	DPMPTSP	
				Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	X	XX	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		185,339,290		150,270,185		137,137,501		135,534,650		98.83 %		285,804,835		148.31 %	CPMPTSP	
				Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen		6 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100 %		9 Dokumen		100 %			
	X	XX	01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		61,623,290		48,458,590		42,507,000		41,395,100		97.38 %		80,853,690		145.80 %	CPMPTSP	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		6 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100 %		9 Dokumen		100 %			
	X	XX	01	2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2,207,200		2,017,650								2,017,650		91.41 %	CPMPTSP	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen								1 Dokumen		100 %			
	X	XX	01	2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1,757,200		657,000								657,000		37.39 %	CPMPTSP	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen								1 Dokumen		100 %			
	X	XX	01	2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		651,000		638,000								638,000		97.90 %	CPMPTSP	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen								1 Dokumen		100 %			
	X	XX	01	2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		128,268,000		97,672,045		94,630,501		94,139,550		99.48 %		191,811,595		149.54 %	CPMPTSP	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51 Laporan		33 Laporan		17 Laporan		16 Laporan		94.12 %		48 Laporan		96.08 %			
	X	XX	01	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		626,900		626,900								626,900		100 %	CPMPTSP	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan								1 Laporan		100 %			
	X	XX	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,979,225,776		5,991,708,432		3,405,796,444		3,036,477,803		89.18 %		9,028,086,235		75.37 %	CPMPTSP	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Laku (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	36 Dokumen/bulan		28 Dokumen/bulan		12 Dokumen/bulan		12 Dokumen/bulan		100 %		40 Dokumen/bulan		111,11 %				
X	XX	01	2.02	C1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10,884,115,088		5,420,869,992		3,277,036,444		2,914,655,264		88.94 %		8,335,525,256		78.58 %		CPMPTSP	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		24 Orang/bulan		12 Orang/bulan		12 Orang/bulan		100 %		36 Orang/bulan		100 %				
X	XX	01	2.02	C2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1,065,110,690		570,838,440		128,760,000		121,822,539		94.61 %		692,660,979		63.25 %		CPMPTSP	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		24 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100 %		36 Dokumen		100 %				
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			470,292,972		474,610,050		128,948,700		121,177,540		95.45 %		595,787,530		128.68 %		CPMPTSP	
						Jumlah jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan sesuai kebutuhan	24 layanan		17 layanan		8 layanan		8 layanan		100 %		25 layanan		104.17 %				
X	XX	01	2.06	C1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			31,509,800		6,570,100		23,066,500		23,002,750		99.72 %		29,572,850		93.50 %		CPMPTSP	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket		1 Paket		1 Paket		100 %		3 Paket		100 %				
X	XX	01	2.06	C2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			98,442,750		222,800,600		13,331,000		13,189,000		98.93 %		235,989,630		239.72 %		CPMPTSP	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		6 Paket		3 Paket		3 Paket		100 %		9 Paket		100 %				
X	XX	01	2.06	C3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			104,990,000		60,665,000		36,925,200		36,690,000		99.35 %		105,355,000		100.35 %		CPMPTSP	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		10 Paket		5 Paket		5 Paket		100 %		15 Paket		100 %				
X	XX	01	2.06	C4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33,904,500		28,545,500		27,500,000		25,687,000		93.41 %		54,232,500		159.96 %		CPMPTSP	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket		1 Paket		1 Paket		100 %		3 Paket		100 %				
X	XX	01	2.06	C5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			138,026,422		104,913,850		13,826,000		13,778,790		99.66 %		118,692,640		85.99 %		CPMPTSP	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2 Paket		1 Paket		1 Paket		100 %		3 Paket		100 %				
X	XX	01	2.06	C6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24,000,000		13,590,000		7,500,000		7,330,000		97.73 %		20,920,000		87.17 %		CPMPTSP	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		8 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100 %		12 Dokumen		100 %				
X	XX	01	2.06	C8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			17,500,000		10,665,000		4,800,000		1,500,000		31.25 %		12,165,000		69.51 %		CPMPTSP	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		24 Laporan		12 Laporan		4 Laporan		33.33 %		28 Laporan		77.78 %				
X	XX	01	2.06	C9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21,829,500		18,860,000							18,860,000		86.40 %		CPMPTSP		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan								12 Laporan		100 %				
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,869,562,428		1,700,817,882		1,078,349,350		995,646,585		92.50 %		2,696,464,457		93.97 %		CPMPTSP	

No	Kode				Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah jenis layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Jasa		8 Jasa		4 Jasa		4 Jasa		100 %		12 Jasa		100 %			
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3,400,000		509,000		1,500,000		949,025		63.27 %		1,458,025		42.88 %		DPMPTSP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540 Laporan		260 Laporan		180 Laporan		120 Laporan		66.67 %		380 Laporan		70.37 %			
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			817,384,320		527,400,243		355,899,350		284,424,824		79.92 %		811,825,067		99.32 %		DPMPTSP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan		6 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		100 %		9 Laporan		100 %			
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,048,778,108		1,172,908,639		718,950,000		710,272,736		98.79 %		1,883,181,375		91.92 %		DPMPTSP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		8 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100 %		12 Laporan		100 %			
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			993,055,600		763,287,308		945,045,700		922,904,296		97.66 %		1,686,191,604		169.80 %		DPMPTSP
						Jumlah jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai kebutuhan	24 Unit		20 Unit		4 Unit		4 Unit		100 %		24 Unit		100 %			
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			56,546,000		34,619,100		28,250,000		27,025,100		95.66 %		61,644,200		109.02 %		DPMPTSP
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit		30 Unit		15 Unit		15 Unit		100 %		45 Unit		100 %			
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			316,172,000		193,339,400		92,230,000		90,198,774		97.80 %		283,538,174		89.68 %		DPMPTSP
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		30 Unit		15 Unit		15 Unit		100 %		45 Unit		100 %			
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			109,529,000		74,352,500		31,806,000		31,804,000		99.99 %		106,156,500		96.92 %		DPMPTSP
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	271 Unit		231 Unit		40 Unit		40 Unit		100 %		271 Unit		100 %			
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			445,668,600		402,111,908		448,520,000		440,487,272		98.21 %		842,599,180		189.06 %		DPMPTSP
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit		1 Unit		1 Unit		100 %		3 Unit		100 %			
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			65,140,000		58,864,400		344,239,700		333,389,150		96.85 %		392,253,550		602.17 %		DPMPTSP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit		1 Unit		1 Unit		100 %		3 Unit		100 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM															95.59 %	91.57 %			98.60 %	86.58 %		
JUMLAH TOTAL								22,611,667,749		12,926,309,538		8,142,651,399		7,601,291,354				20,527,600,892				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															96.27 %	93.35 %			95.52 %	90.78 %		

**REKAPITULASI ALOKASI DANA DAN REALISASI BELANJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023**

Tabel 2.5.

N O	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGAR AN APBD	PAGU ANGGAR AN P- APBD	ANGGARAN				FISIK		SISA PAGU ANGGAR AN
				TARGET		REALISASI		TARG ET (%)	REALI SASI (%)	
				Rp.	%	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4-7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.456.916.702	5.691.277.695	5.691.277.695	100%	5.211.740.874	92%	100%	100%	479.536.821
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.257.501	137.137.501	137.137.501	100%	135.534.650	99%	100%	100%	1.602.851
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.716.503.851	3.405.796.444	3.405.796.444	100%	3.036.477.803	89%	100%	100%	369.318.641
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.898.500	126.948.700	126.948.700	100%	121.177.540	95%	100%	100%	5.771.160
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.076.349.350	1.076.349.350	1.076.349.350	100%	995.646.585	93%	100%	100%	80.702.765
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.907.500	945.045.700	945.045.700	100%	922.904.296	98%	100%	100%	22.141.404
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	429.321.950	421.656.950	421.656.950	100%	419.229.188	99%	100%	100%	2.427.762
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	18.059.500	4.609.500	4.609.500	100%	4.541.200	99%	100%	100%	68.300
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	411.262.450	417.047.450	417.047.450	100%	414.687.988	99%	100%	100%	2.359.462
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	249.653.250	257.318.250	257.318.250	100%	256.834.209	100%	100%	100%	484.041
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	249.653.250	257.318.250	257.318.250	100%	256.834.209	100%	100%	100%	484.041
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.206.720.504	1.314.720.504	1.314.720.504	100%	1.278.672.523	97%	100%	100%	36.047.981
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.206.720.504	1.314.720.504	1.314.720.504	100%	1.278.672.523	97%	100%	100%	36.047.981
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	313.110.000	313.110.000	313.110.000	100%	299.868.768	96%	100%	100%	13.241.232
	Kegiatan 'Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	313.110.000	313.110.000	313.110.000	100%	299.868.768	96%	100%	100%	13.241.232
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	144.568.000	144.568.000	144.568.000	100%	134.945.792	93%	100%	100%	9.622.208
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.568.000	144.568.000	144.568.000	100%	134.945.792	93%	100%	100%	9.622.208
	JUMLAH	7.800.290.406	8.142.651.399	8.142.651.399	100%	7.601.291.354	93%	100%	100%	541.360.045

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun Awal masa periode RPJMD, untuk menghitung kinerja pelayanan DPMPTSP tahun 2024 diperlukan data valid dari realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023, sampai dengan Rencana kerja ini disusun realisasi kinerja tahun 2023 baru sampai dengan triwulan 4.

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 mendukung Tujuan ke 4 RPD *“Meningkatkan Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi”*, indikator tujuan 4.1. RPD *“Pertumbuhan Ekonomi”*. Sasaran 3 RPD yaitu : *“Meningkatnya Investasi Daerah”*. Dari Tujuan pada RPD 2024-2026 di turunkan menjadi sasaran dan tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026, seperti pada tabel di bawah ini :

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Tabel 2.6

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya investasi di Daerah	Realisasi Investasi	1. Menumbuhkan skala invetasi investor	- Persentase investor meningkat skala investasinya	2	3	4
			2. Meningkatnya investor baru	- Peningkatan investor baru	8500	9000	9500

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023, masih memperoleh atau di bebaskan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 4.156.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh enam juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha di Daerah pada pasal 14 ayat 3 bahwa DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro tidak di bebani target penerimaan retribusi daerah (PAD), substansi dari Peraturan Pemerintah ini adalah menitik beratkan pada kemudahan berusaha dan pelayanan terpadu di daerah semakin mudah ijin yang diperoleh maka akan meningkatkan nilai investasi yang di tanamkan pelaku usaha di Bojonegoro. Supaya potensi pendapatan asli daerah terkait bangunan gedung (IMB/PBG) tidak hilang pada tahun 2024 dan seterusnya, maka target tersebut dapat di alihkan pada organisasi perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja dan penilaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022, maka terdapat isu-isu strategis yang dapat diamati terkait dengan manfaat dan pengaruhnya di masa yang akan datang terhadap peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

1. Realisasi investasi PMDN yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMA.
2. Potensi/Peluang investasi belum memiliki Feasibility Study (FS)

3. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
4. Belum adanya kebijakan insentif bagi penanam modal di Kabupaten Bojonegoro;
5. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Bojonegoro;
6. Pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik;
7. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
8. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pusat dan Daerah.
9. Infrastruktur jika investasi berada di wilayah kecamatan yang berada di jalan poros kecamatan kurang mendukung.
10. Belum adanya ketersediaan lahan untuk dapat dijadikan kawasan investasi yang terpadu/kawasan industri.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro memiliki kewenangan dalam hal penanaman modal dan pelayanan perijinan serta pelayanan non perijinan. Saat ini jumlah jenis ijin non berusaha yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro sebanyak 30 jenis. Selain hal tersebut diatas DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro telah melakukan langkah langkah untuk lebih mempercepat dan meningkatkan nilai investasi, antara lain :

1. Deregulasi, Terbitnya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro,

2. Debirokratisasi, Memperpendek proses perizinan (penerapan azas fiktif positif yaitu DPMPTSP dapat menerbitkan izin apabila terjadi keterlambatan persetujuan teknis dari PD teknis sesuai waktu yang telah ditetapkan, tidak ada tatap muka, dan
3. Digitalisasi : Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2021 dalam pelaksanaannya melalui sistem elektronik (simaniz.bojonegorokab.go.id) maupun pemenuhan sarana prasarana yang harus di cukupi dalam rangka mempermudah dan mempercepat waktu pengurusan izin berusaha dan non berusaha.

Salah satu instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan daya saing penanaman modal di Kabupaten Bojonegoro adalah peningkatan tata kelola dan kompetensi SDM serta kecukupan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan Pelayanan dan Perizinan serta berinvestasi dengan indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui Online Single Submission (OSS), penyediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat meningkatkan jumlah Investor yang masuk ke Bojonegoro. Kondisi Potensi Sumber daya alam dan manusianya yang dapat memberikan peluang untuk berinvestasi di Kabupaten Bojonegoro yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan.

Pelayanan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi pelayanan perizinan serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan yaitu dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, tepat waktu,

dan ada kepastian biaya. Melakukan Sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat akan kesadaran kepemilikan izin pada usahanya sehingga dapat meningkatkan nilai investasi serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan izin yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada perusahaan yang tidak taat aturan. Permasalahan tersebut bila tidak segera ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian RPD Bojonegoro dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pelayanan tahun 2023, antara lain sebagai berikut : 1. Kompetensi SDM yang kurang sehingga dalam pengembangan pelayanan, terdapat posisi yang tidak ada pegawai (adanya double job pegawai); 2. Adanya perubahan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dengan memperhatikan kebutuhan anggaran dalam perangkat daerah yang bersangkutan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro Pada tahun 2024 program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro mengalami perubahan. yang kemudian di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Bojonegoro sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2024.

Review terhadap Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2024-2026, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu banyak penyesuaian yang dilakukan sehingga dari anggaran yang telah di rencanakan mengalami penurunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berikut ini adalah tabel review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Tabel 2.7 (Tabel T-C.31)

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	04				Program pelayanan penanaman modal	DPMPTSP	izin terbit tepat waktu	%	85	2.073.984.000	Program pelayanan penanaman modal	DPMPTSP	Jumlahajuan Perizinan yang lengkap persyaratannya	%	85	1.930.338.700	
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan dalam satu tahun	Ijin	18700	2.073.984.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan dalam satu tahun	Ijin	18700	1.930.338.700	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	04	2	01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	18551	1.668.144.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	4000	1.697.344.700	
2	18	04	2	01	0007	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku Usaha	550	405.840.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku Usaha	200	232.994.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	02				Program pengembangan iklim penanaman modal	DPMPTSP	Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitas kemudahan Penanaman modal	%	100	659.373.000	Program pengembang an iklim penanaman modal		Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitas kemudahan Penanaman modal	%	100	528.449.000	
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	DPMPTSP	Jumlah Fasilitas pemberian kemudahan /Insentif penanaman modal	Fasilitas penana man modal	24	19.323.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	DPMPTSP	Jumlah Fasilitas pemberian kemudahan/l nsentif penanaman modal	Fasilitas penana man modal	24	9.339.000	
2	18	02	2	01	00 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Prov insi dalam Pemberian Fasilitas/Ins entif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokume n	2	19.323.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provin si dalam Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokume n	2	9.339.000	
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kot a	DPMPTSP	Jumlah peta potensi investasi yg dibuat	Instrum en	5	640.050.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	DPMPTSP	Jumlah peta potensi investasi yg dibuat	Instrum en	5	519.110.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	02	2	02	00 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	
2	18	02	2	02	00 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DPMPTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Dokumen	1	540.050.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	519.110.000	
2	18	03				Program promosi penanaman modal	DPMPTSP	Jumlah promosi yang dilaksanakan	media promosi	3	590.653.250	Program promosi penanaman modal	DPMPTSP	Jumlah promosi yang dilaksanakan	media promosi	3	579.347.650	
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah promosi penanaman modal yg dilaksanakan	media promosi	3	590.653.250	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah promosi penanaman modal yg dilaksanakan	media promosi	3	579.347.650	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	03	2	01	00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.000.000	
2	18	03	2	01	00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	3	575.653.250	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	3	564.347.650	
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan pengawasan penanaman modal	%	100	313.110.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan pengawasan penanaman modal	%	100	456.818.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah pelaku usaha yang di verifikasi datanya	Pelaku Usaha	238	313.110.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah pelaku usaha yang di verifikasi datanya	Pelaku Usaha	238	456.818.000	
1	18	05	2	01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	238	313.110.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	238	456.818.000	
2	18	06				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah data yang diproses	%	100	154.687.000	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah data yang diproses	%	100	154.687.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah buku yang di cetak	Buku	4	154.687.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah buku yang di cetak	Buku	4	154.687.000	
2	18	06	2	01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	154.687.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	154.687.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yg sesuai kebutuhan	%	100	6.135.586.204	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yg sesuai kebutuhan	%	100	7.414.447.182	
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah buku perencanaan yang di cetak	Dokumen	3	374.765.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah buku perencanaan yang di cetak	Dokumen	3	355.900.035	
6	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	185.482.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	168.308.035	
6	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	12	189.283.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	12	187.592.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen keuangan yg di cetak	dokumen	12	3.976.658.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen keuangan yg di cetak	dokumen	12	4.006.465.078	
2	18	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	3.822.964.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	3.850.825.078	
2	18	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	153.694.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	155.640.000	
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah pelayanan administrasi umum yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai	Layanan	8	135.389.904	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah pelayanan administrasi umum yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Layanan	8	925.511.009	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								kebutuhan										
2	18	01	2	06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.681.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.127.600	
2	18	01	2	06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	18.483.904	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	819.868.509	
2	18	01	2	06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	25.546.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	25.534.800	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	01	2	06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.725.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	18.688.100	
2	18	01	2	06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.793.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.732.000	
2	18	01	2	06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	8.025.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	7.800.000	
2	18	01	2	06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	12	5.136.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	12	4.760.000	
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Jasa	4	1.131.367.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Jasa	4	1.281.392.160	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	01	2	08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	80	1.605.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	80	1.605.000	
2	18	01	2	08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	410.812.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	365.335.960	
2	18	01	2	08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	718.950.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	923.451.200	
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Unit	4	517.405.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Unit	4	845.178.900	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	01	2	09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	36.647.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	47.000.000	
2	18	01	2	09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	145.230.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	104.974.800	
2	18	01	2	09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	34.030.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	63.650.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan P-APBD						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000) 2023	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	18	01	2	09	00 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	1	245.750.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	518.416.900	
2	18	01	2	09	00 10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Paket	1	55.748.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Paket	1	55.748.000	
											9.927.393.454						11.064.087.532	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah yang fokus ke pelayanan perijinan dan peningkatan nilai investasi daerah. Program kegiatan yang direncanakan tidak terdapat usulan anggaran terkait usulan masyarakat, akan tetapi dalam rangka penyusunan rencana kerja 2024, DPMPTSP membuat rencana kerja yang lebih mendekatkan pelayanan kemasyarakat melalui program kegiatan yang dilakukan di kecamatan, di pasar atau lokasi strategis lainnya sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat terlayani terutama dalam hal pembuatan ijin usaha dalam memperoleh NIB atau Nomor Induk berusaha, NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Usulan-usulan, saran, masukan dari para pemohon ijin, calon-calon investor potensial serta dari stakeholder tahun 2022 menjadi masukan DPMPTSP untuk melakukan program kegiatan tahun 2024 sehingga program kegiatan DPMPTSP menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan
tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro
Tabel. 2.8. (Tabel T-C. 32)

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro <i>tidak ada</i> usulan dari pemangku kepentingan tahun 2024	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Adalah bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal.
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan realisasi penanaman modal;
2. Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan

peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

3.1.2. Renstra DPMPTSP Provindi Jawa Timur

“Memajukan Kesejahteraan Umum” merupakan amanat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea IV, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan Jawa Timur, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024, “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong” tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin

Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 diuraikan sabagimana berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (social inequality) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) semakin mengecil. Selain itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap pembangunan antar kawasan sehingga masing-masing kawasan di Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada yang tak berdaya (powerless), terpinggirkan (marginalized), tersisih (excluded), terbungkam (voiceless), terasing (alienated), karena pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan menuju kedaulatan warga.
Pembangunan Ekonomi dan Sosial secara berkesinambungan yaitu Pembangunan yang mengutamakan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah.

Sejalan dengan amanah konstitusi, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Jawa Timur. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (*Public Private Partnership*), pemerintah Jawa Timur berusaha membuka seluas-luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah. Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

Sebagai tujuan akhir pembangunan, kesejahteraan memiliki dimensi yang sangat luas. Selain dimensi ekonomi, kesejahteraan juga akan didorong ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur, utamanya dengan memperhatikan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses

pembangunan yang dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi, dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik pembangunan yang berbasis pada APBD sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur.

Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan jaminan atas kesehatan, pendidikan maupun kedaulatan pangan menjadi prinsip dasar pembangunan. Pemenuhan atas kebutuhan dasar diatas merupakan standard minimal dari pemenuhan atas hak ekonomi maupun sosial dari seluruh warga agar mereka bisa berpartisipasi dalam tatanan ekonomi yang terbuka (inclusive economic order). Sehingga dengan bekal warga Jawa Timur sebagai warga yang sehat, terdidik

dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga yang terhormat, mulia dan merdeka.

Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolak ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses

pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur. Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar PD untuk meningkatkan

masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam

hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi berbasis complaint handling system secara terintegrasi.

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan

hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip harmoni antara aktivitas sosial, ekonomi dan kebudayaan serta ekologi. Oleh karena itu misi dari pembangunan Jawa Timur adalah mendorong pembangunan yang memperdulikan aspek perawatan lingkungan, penghormatan terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya. Sehingga proses pembangunan yang dilakukan merekatkan kesatuan kewargaan dan kesatuan ekologis yang menyatukan tidak saja warga Jawa Timur namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam serta pusparagam kebudayaan yang menaungi kehidupan warga Jawa Timur.

Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya harus mampu mengakomodasi terwujudnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan.

Selain Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terdapat pula Nawa Bhakti Satya yang berasal dari bahasa Sanskerta dan Bahasa Jawa. Nawa Bhakti Satya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dituangkan dalam Sembilan (9) Bhakti, yaitu :

1. Jawa Timur Sejahtera, Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial.
2. Jawa Timur Kerja, Memperluas Lapangan Pekerjaan Dan

Membangun Keunggulan Ekonomi.

3. Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar Berkualitas.
4. Jawa Timur Akses, Membangun Infrastruktur Menuju Pengembangan Wilayah Terpadu Dan Berkeadilan.
5. Jawa Timur Berkah, Membangun Karakter Masyarakat Yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur Dan Berintegritas.
6. Jawa Timur Agro, Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan.
7. Jawa Timur Berdaya, Ekonomi Kerakyatan Dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
8. Jawa Timur Amanah, Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Anti Korupsi.
9. Jawa Timur Harmoni, Menjaga Harmoni Sosial Dan Alam Dengan Melestasikan Kebudayaan Dan Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dalam rangka mewujudkan Misi Bupati Bojonegoro perlu di jabarkan menjadi tujuan dan saran strategis operasional yang di tuangkan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 mendukung Tujuan ke 4 Meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dan Sasaran 3 “Meningkatnya investasi daerah”. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 dan Renstra DPMPTSP 2024-2026 :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bojonegoro
Tabel 3.1

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya investasi di daerah	Realisasi Investasi	1. Menumbuhkan skala investasi investor	- Persentase investor meningkat skala investasinya	2	3	4
			2. meningkatkan investor baru	- Peningkatan Investor Baru	8500	9000	9500

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang/Forum Perangkat Daerah, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Pencapaian MDGs dan IPM;
- c. Perkembangan teknologi informasi;
- d. Kebijakan Pusat dan Provinsi;
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- f. Rencana Aksi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan komponen penunjang keberhasilan pembangunan tersebut akan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPD Kabupaten Bojonegoro dan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, dimana program dan kegiatan Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Program pelayanan penanaman modal, dengan indikator program Jumlah ajuan perijinan yang lengkap persyaratannya.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2. Program pengembangan iklim penanaman modal, dengan indikator program Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitasi kemudahan Penanaman modal
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3. Program promosi penanaman modal, dengan indikator program Jumlah promosi yang dilaksanakan
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator program Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan pengawasan penanaman modal
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan indikator Jumlah data yang di proses.
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :
 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yg sesuai kebutuhan
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Rekapitulasi Urusan, Program, Sub kegiatan dan
Pendanaan Tahun 2024
Tabel. 3.1**

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	LOKASI	PENDANAAN APBD (Rp.)	PENDANAAN P-APBD (Rp.)
1	Nama Bidang Urusan : Urusan Bidang Penanaman Modal		DPMPTSP Kab. Bojonegoro	11.111.719.258	11.064.087.532
	- Jumlah Program	6			
	- Jumlah kegiatan	11			
	- Jumlah Sub Kegiatan	28			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 telah selaras dengan program prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro dan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026. Guna tercapainya target indikator kinerja DPMPTSP, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja P-APBD Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024

NO	URUSAN, NO REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU			KET
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
						URUSAN BIDANG PANANAMAN MODAL										
						DINAS PANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	2	18	04	2	01	Program pelayanan penanaman modal	Program pelayanan penanaman modal	izin terbit tepat waktu	izin terbit tepat waktu	85 %	85 %	85 %	2.073.984.000	2.071.904.000	1.930.338.700	
	2	18	04	2	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan dalam satu tahun	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan dalam satu tahun	18700 Ijin	18700 Ijin	18700 Ijin	2.073.984.000	2.071.904.000	1.930.338.700	
	2	18	04	2	01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	1.668.144.000	1.666.064.000	1.697.344.700	
	2	18	04	2	01	0007	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	405.840.000	405.840.000	232.994.000	
2	2	18	02			Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitas kemudahan Penanaman modal	Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitas kemudahan Penanaman modal	100 %	100 %	100 %	659.373.000	659.373.000	528.449.000	
	2	18	02	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pemberian kemudahan/Insentif penanaman modal	Jumlah Fasilitas pemberian kemudahan/Insentif penanaman modal	24 Fasilitas penanaman modal	24 Fasilitas penanaman modal	24 Fasilitas penanaman modal	19.323.000	19.323.000	9.339.000	
	2	18	02	2	01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	19.323.000	19.323.000	9.339.000	
	2	2	18	02	2	01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	1.230.703.250	3.461.700	3.461.700	
	2	18	02	2	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yg dibuat	Jumlah peta potensi investasi yg dibuat	5 Instrumen	5 Instrumen	5 Instrumen	640.050.000	640.050.000	519.110.000	
	2	18	02	2	02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-	
	2	18	02	2	02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	540.050.000	540.050.000	519.110.000	

NO	URUSAN, NO REKENING						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU			KET
							SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	2	18	03				Program promosi penanaman modal	Program promosi penanaman modal	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Jumlah promosi yang dilaksanakan	3 media promosi	3 media promosi	3 media promosi	590.653.250	590.653.250	579.347.650	
	2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal yg dilaksanakan	Jumlah promosi penanaman modal yg dilaksanakan	3 media promosi	3 media promosi	3 media promosi	590.653.250	590.653.250	579.347.650	
	2	18	03	2	01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	2	18	03	2	01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	575.653.250	575.653.250	564.347.650	
4	2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan pengawasan penanaman modal	Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan pengawasan penanaman modal	100 %	100 %	100 %	313.110.000	456.818.000	456.818.000	
3	1	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang di verifikasi datanya	Jumlah pelaku usaha yang di verifikasi datanya	238 Pelaku Usaha	238 Pelaku Usaha	238 Pelaku Usaha	313.110.000	456.818.000	456.818.000	
	1	18	05	2	01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	238 Pelaku Usaha	238 Pelaku Usaha	238 Pelaku Usaha	313.110.000	456.818.000	456.818.000	
5	2	18	06				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data yang diproses	Jumlah data yang diproses	100 %	100 %	100 %	154.687.000	154.687.000	154.687.000	
	2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku yang di cetak	Jumlah buku yang di cetak	4 Buku	4 Buku	4 Buku	154.687.000	154.687.000	154.687.000	
	2	18	06	2	01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	154.687.000	154.687.000	154.687.000	

NO	URUSAN, NO REKENING						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU			KET
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2	18	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yg sesuai kebutuhan	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yg sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	6.135.586.204	7.178.284.008	7.414.447.182	
6	01	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku perencanaan yang di cetak	Jumlah buku perencanaan yang di cetak	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	374.765.000	374.765.000	355.900.035	
6	01	01	2	01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	185.482.000	185.482.000	168.308.035	
6	01	01	2	01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	189.283.000	189.283.000	187.592.000	
2	18	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yg di cetak	Jumlah dokumen keuangan yg di cetak	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.976.658.800	4.704.231.604	4.006.465.078	
2	18	01	2	02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.822.964.000	4.548.456.804	3.850.825.078	
2	18	01	2	02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	153.694.800	155.774.800	155.640.000	
2	18	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Jumlah pelayanan administrasi umum yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	135.389.904	335.389.904	925.511.009	
2	18	01	2	06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	24.681.000	24.681.000	34.127.600	
2	18	01	2	06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	18.483.904	218.483.904	819.868.509	
2	18	01	2	06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	25.546.000	25.546.000	25.534.800	
2	18	01	2	06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	38.725.000	38.725.000	18.688.100	
2	18	01	2	06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	14.793.000	14.793.000	14.732.000	
2	18	01	2	06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8.025.000	8.025.000	7.800.000	
2	18	01	2	06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.136.000	5.136.000	4.760.000	

NO	URUSAN, NO REKENING						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU			KET
							SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	4 Jasa	4 Jasa	4 Jasa	1.131.367.000	1.246.492.000	1.281.392.160	
	2	18	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	1.605.000	1.605.000	1.605.000	
	2	18	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	410.812.000	410.812.000	356.335.960	
	2	18	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	718.950.000	834.075.000	923.451.200	
	2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	517.405.500	517.405.500	845.178.900	
	2	18	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	15 Unit	36.647.500	36.647.500	47.000.000	
	2	18	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	15 Unit	145.230.000	145.230.000	104.974.800	
	2	18	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	40 Unit	34.030.000	34.030.000	63.650.000	
	2	18	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	245.750.000	245.750.000	518.416.900	
	2	18	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	55.748.000	55.748.000	111.137.200	
JUMLAH														9.927.393.454	11.111.719.258	11.064.087.532	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 – 2026 dan mengacu kepada Rencana Perangkat daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 – 2026. Pencapaian atas rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 dalam meningkatnya investasi PMA dan PMDN dari target Renstra 7.1 T terealisasi sebesar 9.8 T dengan capaian sebesar 138 % dari target yang direncanakan. namun ada beberapa elemen dalam indikator tersebut yang belum maksimal. Untuk itu perlu adanya evaluasi atas hasil capaian indikator tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan calon investor di Kabupaten Bojonegoro.

Komitmen dan dukungan dari seluruh pihak di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta guna terwujudnya sinergitas kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di atasnya. Harapan kami semoga Renja Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bojonegoro.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro, selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan

kinerja, bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Akhir yang telah ditetapkan sangat ditentukan peran, tanggung jawab, serta kinerja dari seluruh jajaran pegawai DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

5.1. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan dokumen tahunan yang bersifat operasional, dokumen Renja merupakan implementasi dari dokumen Renstra. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan di bidang penanaman modal tergantung dari peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang terkait dengan bidang penanaman modal yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

5.2. Rencana Tindaklanjut

Pada akhirnya Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini diharapkan akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam suasana demokratis, tentram, aman, rukun dan diridhoi Allah SWT serta mewujudkan SDM yang berkualitas, maju, damai dan sejahtera.